

BAB I

PENDAHULUAN

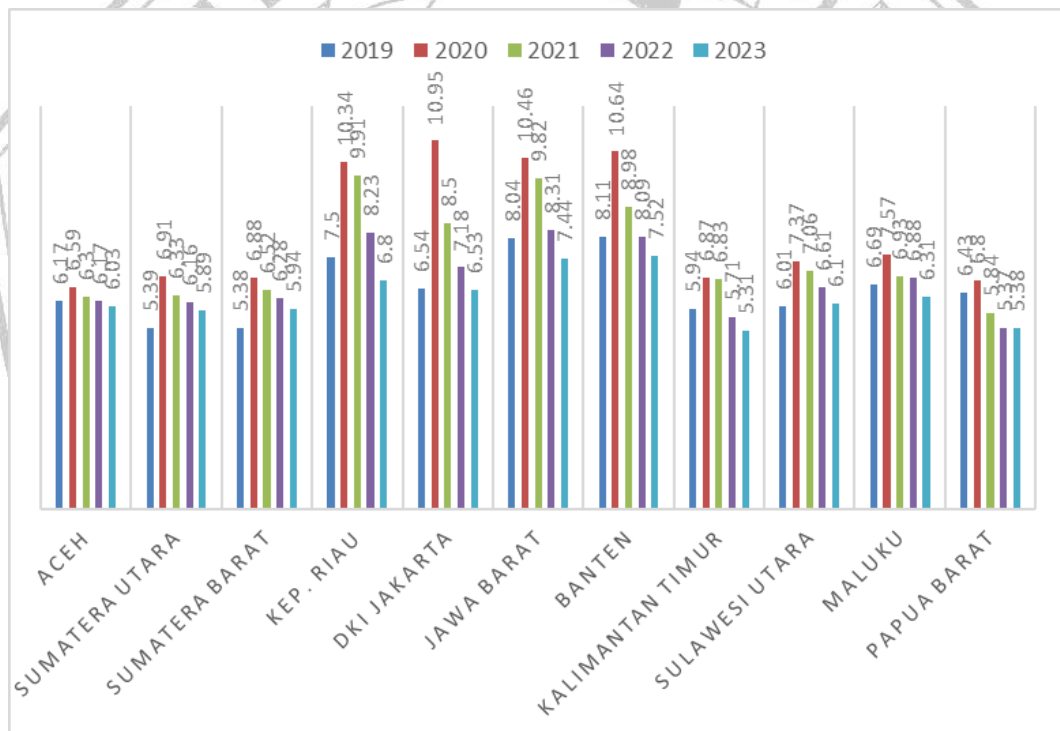
A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tingginya angka pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta menjadi indikator tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia. Di Indonesia, permasalahan pengangguran terbuka (TPT) terus menjadi tantangan struktural yang berulang setiap tahunnya (Mulia & Saputra, 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menunjukkan adanya masalah ekonomi yang serius, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, ketidakmampuan sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, atau ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja. Permasalahan pengangguran merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh semua negara, baik yang berkembang maupun maju. Pengangguran merujuk kepada individu yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Dalam mengatasi masalah pengangguran membutuhkan usaha yang berat karena dampaknya terhadap sektor perekonomian. Pengangguran adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dapat kita simpulkan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sudah bekerja belum mendapatkan pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan. (Qomariyah, 2013). Masalah pengangguran yang dialami dapat dilihat dari angka pengangguran yang dipublikasikan setiap tahunnya. Pengangguran di suatu negara dapat terjadi karena jumlah lapangan kerja di suatu wilayah tertentu tidak mencukupi angkatan kerja, atau karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran lapangan kerja. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (Suroya & Erdkhadifa, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Namun, salah satu masalah utama adalah kurangnya lapangan kerja yang memadai bagi para pencari kerja (Devra, 2022). Tentunya fenomena tersebut membuat perekonomian pada negara Indonesia menjadi

terganggu maupun terhambat dengan adanya ke tidak mampuan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan sehingga muncul permasalahan pada perekonomian yang disebut dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Namun, masalah pengangguran yang tinggi masih menjadi kendala bagi pemerintahan Indonesia (Hartati, 2020). Menurut data yang disajikan oleh BPS Indonesia, tingkat pengangguran tertinggi berada pada Provinsi Banten menempati urutan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 yaitu 7.52%. dan provinsi Sulawesi Barat menempati urutan terakhir atau yang terendah tingkat pengangguran terbuka yaitu 2.27%. Tingkat Pengangguran dijelaskan oleh BPS sebagai persentase dari jumlah orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan angkatan kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.



Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah

Dapat dilihat pada gambar 1, TPT tertinggi di Indonesia yang bergerak fluktuasi dari 5 tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 dalam menunjukkan bahwa Provinsi Banten mencatat TPT tertinggi sebesar 7,52%, sementara Provinsi Sulawesi Barat memiliki TPT terendah sebesar 2,27%. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan

yang cukup mencolok antarwilayah, yang mengindikasikan bahwa faktor ekonomi makro dapat berpengaruh besar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Beberapa variabel ekonomi makro yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi. PDRB yang meningkat mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat, yang pada gilirannya diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. PMDN sebagai indikator investasi dalam negeri memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan sektor produktif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja (Mutiarasari, 2018). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, perusahaan cenderung membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Namun demikian, di sisi lain, penanaman modal dalam negeri juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran dengan memicu pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja (Kurniawan, Militana, & Suharto, 2017). Sebagai contoh, investasi dalam industri manufaktur atau sektor jasa yang intensif tenaga kerja dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran (Iswaningsih, Budiarta, & Ujjanti, 2021).

Selanjutnya, kebijakan terkait upah minimum juga memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran. Penetapan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan upah minimum yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif bagi peluang kerja, terutama bagi sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan menanggung biaya tambahan (Faizah, 2022).

Sementara itu, tingkat inflasi juga memiliki korelasi dengan tingkat

pengangguran. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal (Langi, 2014). Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi mereka, yang berdampak negatif pada pendapatan perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari perlambatan aktivitas ekonomi, perusahaan mungkin akan mengurangi produksi dan memotong tenaga kerja untuk mengurangi biaya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran (Hutagalung, Purba, & Purba, 2024). Inflasi yang tinggi juga dapat merugikan sektor-sektor tertentu, terutama mereka yang tidak dapat menyesuaikan harga produk mereka dengan cepat atau yang bergantung pada impor. Sebagai contoh, industri manufaktur atau sektor perdagangan yang terpengaruh oleh kenaikan harga bahan baku atau barang impor akan mengalami tekanan untuk mempertahankan profitabilitas mereka. Akibatnya, perusahaan dalam sektor ini mungkin akan mengurangi produksi atau melakukan pemotongan staf, yang berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran di tingkat nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang memperhatikan stabilisasi tingkat inflasi dapat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengangguran (Kartikawati, 2023).

Pentingnya melakukan analisis yang komprehensif tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, upah minimum, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tidak dapat diabaikan. Pertama-tama, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan fondasi bagi penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan memahami dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Sidiq, 2023). Penanaman modal dalam negeri memainkan peran penting dalam Investasi yang masuk ke sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, seperti industri manufaktur, pertanian, dan sektor jasa, dapat secara langsung mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan adanya investasi dalam negeri, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja (Supardi, 2015).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh PDRB, PMDN, UMP, dan inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 11 provinsi dengan TPT tertinggi selama periode 2019–2023, diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi pengangguran.

B. Perumusan Masalah

Mengikuti Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Apakah PDRB, Penanaman Modal dalam Negeri, Upah Minimum, dan Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 11 provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini hanya mencakup 11 provinsi di Indonesia yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019–2023.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diukur dalam satuan persentase dari total angkatan kerja.
3. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas empat indikator makroekonomi, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Inflasi.
4. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendag, dan Kemnaker.
5. Periode waktu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahun 2019 hingga 2023, yang merupakan data tahunan (time series) dan mencakup beberapa wilayah (cross section) sehingga membentuk data panel seimbang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di 11 Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka di 11 Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di 11 Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di 11 Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memperkaya kajian ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi makro dan ketenagakerjaan. Dengan mengkaji pengaruh PDRB, PMDN, UMP, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman atas hubungan antara variabel makroekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, penataan kebijakan upah minimum, pengelolaan investasi domestik, serta pengendalian inflasi.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti dan kalangan akademisi sebagai referensi untuk studi lebih lanjut mengenai hubungan antara indikator ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian serupa dengan cakupan wilayah, periode waktu, maupun variabel tambahan yang lebih luas. Bagi Investor dan Pelaku Ekonomi: Menyediakan informasi mengenai sektor infrastruktur yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Bagi Masyarakat dan Akademisi: Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengkaji dampak infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang lainnya.